

PROBLEMATIKA PENDEKATAN PENDIDIKAN KARAKTER

*Aris Nurkhamidi**

Abstrak: Tahun 2011 ini pemerintah mencanangkan pendidikan karakter bagi dunia pendidikan, mulai tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Salah satu dasar fundamentalnya, saat ini masalah besar dalam dunia pendidikan adalah menipisnya bangunan karakter anak didik. Anak didik tumbuh dan berkembang secara mental, sosial dan intelektual, tetapi tercerabut dari akar budayanya sebagai bangsa yang berkeadaban. Pengetahuan mereka makin luas, ilmunya makin mendalam, keterampilannya makin kreatif, tetapi ada masalah pada mentalitas, nilai, dan moralitas. Pendidikan bukan saja menjadikan orang berubah secara kognisi dan psikomotorisnya, tetapi harus terintegrasi dengan bangunan nilai yang kuat.

Kata Kunci: pendidikan, karakter, bangsa.

PENDAHULUAN

Apakah yang ada dalam benak Anda membaca judul di atas? Tentu saja beragam. Ada yang dalam benak hatinya terbayang anak-anak yang rajin, shalih, santun, dan berkepribadian terpelajar. Tapi mungkin juga ada yang sebaliknya, segera terbersit anak-anak berseragam sekolah yang berkelahi di jalanan, nongkrong di *mall* atau di emperan *mall*, naik kendaraan *ngebut*, sibuk dengan *handphone* di lingkungan sekolah, *make up* dan mode pakaian seragam seperti artis, dan mungkin lebih banyak lagi.

Begitulah sebagian potret pelajar di Indonesia saat ini. Ada anak-anak yang komitmen dirinya kuat, ada yang lemah dan ada yang benar-benar miskin

* *Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Jl.Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, e-mail: arisenha@yahoo.com.*

komitmen diri. Anak-anak terpelajar yang hebat di Indonesia juga tidak sedikit. Ada anak didik yang menjuarai olimpiade di forum ilmiah internasional, ada yang bisa membuat robot, ada anak-anak yang masih duduk di SD dan SMP bisa membuat program antivirus, animasi dan sebagainya. Anak-anak yang di usia belia juga banyak yang membaca al-Quran dengan fasih, bahkan menghafal 30 juz dengan luar biasa (Program PPPA: 2011).

MASALAH KARAKTER PELAJAR

Berdasar fakta, harus diakui bahwa generasi *brilliant* di negeri kita jauh lebih sedikit dibanding yang sebaliknya. Yang *brilliant* dapat kita jumpai melalui media masa, televisi, koran atau internet, hanya sedikit sekali yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebaliknya, lebih mudah menjumpai potret pelajar yang bermasalah ada di sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh melihat televisi. Banyak siswa berseragam nongkrong di *mall* atau area bermain di jam-jam sekolah. Siswa-siswi bergandeng tangan hal yang lumrah terlihat di mana-mana. Riset tentang pengalaman seks di kalangan pelajar sudah diketahui hasilnya. Masih ingatkan? Sebagian pelajar pernah punya pengalaman seks mulai yang ringan sampai yang menggugurkan kandungan. Riset Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2010 juga menunjukkan bahwa di kalangan pelajar, konsumsi narkoba bukan menurun, tetapi naik (Badan Narkotika Nasional, 2011).

Sementara itu di bidang akademik, capaian hasil belajar nasional di setiap daerah berbeda dengan daerah lain. Ada daerah di mana kebanyakan nilai ujian nasional siswa cukup tinggi, tetapi daerah lain tingkat kelulusannya masih rendah. Ada sekolah yang 100 % lulus ujian nasional, tetapi ada yang 90 % tidak lulus ujian nasional (Kompas, 14 Mei 2011: 12). Beberapa daerah itu rentang bedanya (*gap*) cukup signifikan. Ini mengindikasikan bahwa ada masalah kesenjangan kualitas akademik masyarakat Indonesia, yang dipengaruhi banyak faktor, mulai SDM pendidikan, fasilitas atau sarana dan juga rata-rata angka kecukupan gizi masyarakat. Capaian hasil belajar nasional setiap tahun juga tidak naik secara signifikan. Ini mengindikasikan bahwa *Human Development Index* generasi kita sulit diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dengan negara lain.

Lebih ironi lagi dalam masalah ini adalah ada kesenjangan pada capaian dan standar akademik antara satu daerah dengan daerah lain di negeri

Indonesia, tetapi hampir-hampir tidak ada kesenjangan pada “pencapaian” karakter dan etika. Coba identifikasi manakah daerah yang masih bisa disebut memiliki standar etik dan kultur yang kuat. Daerah manakah yang gaya hidup pelajarnya masih benar-benar Indonesia yang seperti dahulu? Apakah anak-anak di daerah pinggiran atau pedesaan (*rural – remote area*) gaya hidupnya (*life style*) sederhana, lugu dan tidak seperti anak metropolis? Coba tanyakan pada setiap guru, apakah budaya sopan santun siswanya menguat atau melemah. Tanyakan apakah etos belajar siswa menguat? Bagaimana dengan minat baca anak-anak sekolah? Apakah keprihatinan guru paling dominan saat ini? Mungkin jawaban terakhir dari banyak pertanyaan tersebut adalah keprihatinan masalah moral anak didik.

Saat ini batas antara kota dengan desa tidak lebih dari batas administratif saja. Dalam konteks pemikiran, budaya, norma, nilai atau rasa mungkin sudah tidak terbatas lagi (*borderless*). Apa yang menjadi *trend* di kota mulai dari gaya hidup, ide sampai produk konsumtif tidaklah beda dengan desa. Standar nilai kepatutan dan kemanusiaan antara kota dan desa telah tipis. Kata-kata “...ah, anak desa saja kok...” tidak sering muncul lagi dari orang tua yang menasehati anaknya atau guru pada muridnya. Ini karena guru dan orang tua sadar bahwa kota dan desa tidak ada sekat lagi yang bisa membatasi transformasi nilai dan pemikiran anak-anak. Salah satu faktor (utamanya) adalah globalisasi yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, televisi termasuk di dalamnya, sementara tingkat konsumsi media anak-anak kurang terkontrol (Teresa Orange & Louise O’ Flynn.2005: 269).

Pergeseran tata nilai yang mengakibatkan munculnya masalah moral terjadi pada siswa di setiap tingkatan pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Hubungan antara siswa laki-laki dan perempuan yang makin permisif tidak hanya terjadi di tingkatan siswa SMA dan sederajat, sekalipun yang paling mudah terlihat adalah gejala pada siswa SMA dan sederajat. Anak-anak SMP juga telah mengalami hal yang sama.

Coba bandingkan apa beda relasi antara siswa laki-laki dan perempuan dahulu dengan sekarang. Dahulu dianggap menjadi kekasih seseorang saja sudah malu, padahal hanya dianggap. Jika benar-benar memang telah punya kekasih, merasa malu kalau diketahui orang lain. Melihat gaya hidup anak terpelajar sekarang sepertinya perasaan itu tidak ada lagi. Anak-anak tidak juga ada perasaan malu jika punya kekasih dan diketahui oleh gurunya, termasuk orang tuanya. Yang ekstrim, di televisi pernah diberitakan pelajar

laki-laki dan perempuan bersama-sama menonton film porno. Berita pelajar pesta shabu juga sering terdengar.

Itu tadi soal etika hubungan laki-laki dan perempuan. Sekarang tentang kejujuran. Dahulu menyontek adalah hal yang tabu dan ditabukan. Ketahuan menyontek oleh teman apalagi oleh guru, menyebabkan suasana batin tidak nyaman, perasaan bersalah dan dosa. Coba bandingkan dengan kondisi sekarang. Anak-anak tidak malu diketahui tengah mencontek pada saat mengerjakan ujian. Tidak malu dilihat oleh teman bahkan gurunya.

Hancurnya menara kejujuran ini semakin dahsyat terjadi pada awal-awal diberlakukannya sistem ujian nasional. Pada tiga tahun pertama dilaksanakannya ujian nasional, angka kejujuran cukup memprihatinkan. Pembicaraan tentang bocoran soal ujian nasional, kongkalikong antara satu sekolah dengan sekolah lain dalam mengawasi ujian nasional, keterlibatan guru dalam membantu siswa mengerjakan soal ujian menjadi pengisi atmosphere pemberitaan nasional. Ada juga sekolah yang membuat sistem pelaksanaan ujian nasional memungkinkan siswa bekerjasama atau mendapat asupan jawaban dari guru (kasus di Bojonegoro pada ujian nasional tahun 2011).

Bisa saja dimengerti bahwa hal-hal seperti ini dimaksudkan sekolah untuk kebaikan siswa. Baik dalam arti hasil ujiannya tidak mengecewakan, sehingga dapat mempermudah proses penyelesaian studi di sekolah, membesarkan hati orang tua / wali murid, membantu siswa dalam seleksi proses studi lanjut, dan juga tidak dipungkiri adalah gengsi sekolah. Tetapi yang tidak bisa dimengerti adalah bahwa cara-cara di atas telah meruntuhkan ajaran moral tentang kejujuran yang telah dibangun selama sekian lama oleh institusi pendidikan, orang tua dan lingkungan. Anak-anak seperti mendapat pendidikan baru bahwa di tengah keterpaksaan, apapun bisa dilakukan. Itu jika dianggap ada sisi keterpaksaan dalam menjawab soal ujian nasional. Anak-anak juga mendapat pendidikan baru bahwa sistem pengawasan ujian nasional yang sudah baik, menyertakan tim pemantau independen atau pengawas independen dan juga polisi, dapat disiasati dengan teknik yang “baik”. Anak-anak juga mendapat pelajaran baru bahwa moralitas hanya tegak dalam suasana normal, bukan dalam suasana kritis. Hati nurani dapat dinomorduakan setelah kepentingan.

Sayangnya tidak banyak yang melawan dengan lantang pilihan keputusan sekolah seperti di atas. Kebanyakan siswa mengiyakan demi kepentingan

dirinya. Hanya beberapa orang yang berani melawan atas nama kejujuran, diantaranya adalah Yayasan Air Mata Guru di Medan, Sumatera Utara. Yayasan air mata guru ini anggotanya diantaranya adalah guru-guru yang menolak cara sekolah membantu siswanya mengerjakan ujian dengan cara membantu menjawab soal ujian dengan melibatkan guru mata pelajarannya. Pihak sekolah mengkondisikan pengaturan ruangan, pengawas ruangan dan pihak yang terlibat lainnya. Sayang guru-guru dalam Yayasan Air Mata Guru ini harus berhadapan dengan otoritas sekolah dan yayasan dimana mereka mengajar, karena dianggap tidak loyal terhadap lembaga.

Masalah lain pelajar kita adalah rendahnya etos belajar, anak-anak cenderung pragmatis, mau menang sendiri tanpa mengikuti proses. Tradisi ini akan menjadikan anak-anak bermental lemah, bukan pemberani, kurang berani mengambil risiko, dan sebagainya, seperti gejala umum bangsa Indonesia saat ini (Farid El-Shamawi, 2002:180).

FAKTOR PENYEBAB

Ada beberapa sebab utama munculnya masalah dekontruksi karakter anak didik. Masing-masing adalah: (1) globalisasi dan ideologisasi Barat; (2) rapuhnya sistem sosial nasional; (3) politik pendidikan belum mapan; dan (4) kurangnya figur dan teladan.

1. Globalisasi dan Ideologisasi

Globalisasi menjadi fakta yang tidak terhindarkan, dunia yang besar menjadi mengecil bagai satu desa (*global village*) dan hampir mustahil dapat dilakukan penolakan baik dalam arti fisik-geografis maupun dalam arti sosiologis. Kendati demikian, gerakan antiglobalisasi bukan berarti tidak penting dan makna signifikan. Gerakan antiglobalisasi menyadarkan negara-negara besar, terutama Amerika agar tidak mengkooptasi negara-negara kecil, sebaliknya negara-negara kecil perlu meningkatkan dirinya agar tidak menjadi obyek kepentingan negara-negara besar (*counter culture*). Kepentingan-kepentingan itu bisa dalam arti fisik, ideologi, dan yang paling terlihat adalah ekonomi (Eko Budiharjo, 2010:2).

Para ahli menyadari konsekuensi yang akan muncul dalam era globalisasi. Yang menjadi agenda masyarakat internasional adalah meningkatkan daya tawar setiap negara dan bangsanya, agar setiap negara memiliki peran strategis,

kemampuan yang cukup dan kontribusi penting, sehingga terbangun relasi interdependensi, saling bergantung, bukan dependensi.

Namun faktanya, hegemoni negara-negara besar Barat tidak bisa dipungkiri. Dalam konteks ekonomi, arus ekspor terjadi secara deras dari negara-negara maju ke negara berkembang, bahkan miskin. Sementara ekspor dari negara miskin atau negara berkembang ke negara maju lebih banyak ekspor sumber daya alam. Karakteristik arus impornya tentu berbeda. Ekspor dari negara maju ke negara berkembang dan miskin lebih banyak produk industri, sementara ekspor dari negara berkembang ke negara maju banyak berupa sumber daya alam atau bahan baku industri. Ini terjadi karena secara teknologi, negara maju memiliki teknologi yang cukup untuk mengolah bahan baku, sementara negara berkembang tidak punya.

Di bidang jasa, ekspor negara maju ke negara berkembang adalah pengiriman tenaga-tenaga ahli, yang akan menduduki posisi strategis di negara berkembang, apalagi negara miskin. Sebaliknya, ekspor sumber daya manusia dari negara miskin atau berkembang ke negara maju adalah sumber daya komplementer, yang akan mengisi tenaga lapis bawah, pekerja fisik yang menggunakan otot, dan menekuni pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan oleh robot.

Arus ekspor – impor di bidang jasa lebih merisaukan lagi. Negara-negara maju banyak mengekspor produk jasa, seperti konsultan manajemen, lembaga sertifikasi, lembaga akuntansi, jasa konsultan pembangunan dan pemerintahan dan masih banyak lagi.

Uraian arus ekspor-impor di atas menggambarkan bahwa negara maju memiliki lebih banyak kepentingan kepada negara miskin atau negara berkembang dibanding tingkat kepentingan negara berkembang terhadap negara maju. Negara maju berkepentingan untuk *survive*, dengan cara mendapatkan pasokan sumber daya alam dan sumber pembiayaan di bidang industri dan pengolahan, yang hal itu hanya akan didapat dari relasi dengan negara berkembang atau negara miskin. Sementara negara miskin sebetulnya dalam konteks *survivality* sebetulnya lebih memiliki daya tahan ekonomi, namun kurang memiliki *science* dan *knowledge* untuk meningkatkan produktifitasnya. Tetapi argumentasi ini tidak dapat diterima oleh negara maju. Dalam proposal ilmiahnya, yang sebetulnya berisi propaganda, menjelaskan bahwa negara maju dengan negara miskin dan berkembang sama-sama punya kepentingan, hanya wilayah tawar-menawarnya saja yang berbeda.

Pemikiran antiglobalisasi mengkritisi bahwa negara Barat perlu membuat bingkai (*frame*) dan kekuatan rasional untuk menjelaskan atau mempengaruhi negara miskin dan berkembang tersebut. Bingkai dan kekuatan rasional (rasionalisasi) tersebut adalah ideologi globalisasi, yang menjelaskan bahwa globalisasi adalah kebutuhan semua negara yang akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama. Tema kesetaraan, hak azasi manusia, *civil society* lalu muncul dalam konteks kepentingan ini. Tema-tema tersebut lalu disajikan dalam bentuk pemikiran, doktrin keilmuan, produk kebudayaan seperti kesenian, makanan, mode dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ini adalah perdebatan anti paham globalisasi dan glocalisasi.

Kondisi yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia ini, ternyata arus globalisasi terjadi begitu deras dengan tingkat konsumsi kebudayaan yang tinggi. Produk makanan, gaya hidup, mode pakaian, konsumsi produk teknologi, kesenian dan sebagainya. Yang menjadi masalah dalam konteks ini, anak-anak terpelajar lebih familiar dengan produk kebudayaan dan aplikasi teknologi negara-negara maju, tetapi tidak terinspirasi untuk kreatif atau menguasai teknologinya.

Ideologi globalisasi menjangkit di setiap lapisan masyarakat, miskin – kaya, terpelajar atau tidak, dari lapisan sosial bawah sampai tinggi, semuanya secara sadar atau tidak mengkonsumsi dan hidup dengannya. Inilah salah satu sebab munculnya masalah karakter di lingkungan pelajar. Anak didik hidup di sekolah dengan nilai-nilai pendidikan, tetapi lebih banyak hidup dan tumbuh dengan masyarakat yang berideologi global seperti di atas. Akibat ketidaktahuan dan ketidaksiapan secara ekonomi, mental dan pengetahuan, anak-anak menjadi tercerabut dari akar budaya Indonesia yang religius, humanis, toleran, guyub, menjadi liberal, kompetitif, egois dan individualis.

Lihatlah anak terpelajar, tanpa malu melakukan sesuatu yang secara norma atau moral kurang pantas, dan hal itu dilakukan secara terbuka. Anak-anak tidak malu dengan kondisi ekonomi sebagai pengangguran (*jobless*), tidak malu auratnya terlihat, ukuran tabu menjadi kabur, hampir tidak ada lagi. Mental bersahaja, pekerja tekun, berusaha keras terus tergerus oleh pragmatisme, budaya menerabas, serba instan. Jika pada saatnya gaya hidup ini tidak ditopang oleh kemampuan prasyarat mencukupinya, tidak mustahil kriminalitas akan menjadi sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya.

2. **Rapuhnya Sistem Sosial**

Jatuhnya rezim Orde Baru oleh gerakan reformasi didorong akumulasi masalah sosial di Indonesia yang dirasa sudah tidak dapat ditahan-tahan lagi. Dalam bidang politik, budaya demokrasi tidak tumbuh subur, kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi salah satu bagian dari Pancasila, secara faktual kurang dijamin oleh pemerintah, bahkan penguasa politik Orde Baru mengebiri hak-hak sosial politik warga negara. Bentuk-bentuk pengebirian itu misalnya pengaturan sistem perpolitikan, dimana jumlah partai politik dibatasi, dan fungsi eksekutif lebih menonjol daripada fungsi legislatif.

Dalam bidang ekonomi, keadilan sosial dan ekonomi yang juga merupakan salah satu bagian penting dalam nilai-nilai pengamalan Pancasila, tidak dapat ditemukan relevansinya dengan kontruksi ekonomi nasional. Beberapa sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh para pemilik modal, baik dilakukan secara sendiri maupun berkongsi dengan pemerintah atas nama negara.

Karena masalah-masalah tersebut sudah cukup akut, gerakan reformasi bercita-cita untuk membangun kembali Indonesia sebagai negara yang lebih adil dalam kontek hukum dan sosial, beradab dalam konteks tatanan kemasyarakatan dan sejahtera dalam konteks ekonomi.

Sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita reformasi tersebut, dilakukannya penataan terhadap sejumlah lembaga negara. Lembaga yang fungsinya dianggap tidak perlu lagi ditutup, sedang kepentingan-kepentingan baru yang belum dapat diakomodasi oleh lembaga yang ada, dibuatkan saluran birokrasi baru. Selain penataan kelembagaan, juga secara sistemik dibuat regulasi yang akan menjadi aturan bagi tata kehidupan baru. Regulasi tersebut ada yang muncul sebagai inisiatif lembaga legislatif dan ada yang inisiatif dari pemerintah. Di antara undang-undang penting yang lahir dalam era reformasi adalah undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang otonomi daerah, undang-undang tentang pengelolaan ekonomi.

Namun dalam evaluasi sepuluh tahun reformasi, cita-cita reformasi belum menunjukkan hasil menggembirakan. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang diharapkan mampu menjadi energi bagi kebangkitan dan kemandirian masyarakat, mengalami distorsi dan anomali. Indikator yang terlihat adalah banyaknya perkumpulan, organisasi atau apapun namanya yang lebih banyak

menjadi gerakan ego kelompok yang terkadang bersumbu rasial, seperti kewilayahan, keagamaan, sentimen kewilayahan dan sebagainya. Perjuangan untuk kepentingan bersama yang sebetulnya terbatas pada organisasi ini sering berbenturan kepentingan dengan nasionalisme atau ideologi-ideologi universal.

Budaya korupsi yang diperangi dari hari ke hari ternyata di jaman reformasi secara kualitas tidak menurun. Angka kebocoran anggaran negara yang disebabkan karena inefisiensi juga cukup tinggi, bahkan institusi penegak hukum juga sering kurang dipercaya dalam menegakkan kepentingan bangsa dalam penanganan kasus korupsi (HCB Dharmawan.2004: 8).

Nepotisme yang dianggap sebagai masalah besar dalam rezim Orde Baru ternyata juga tumbuh subur dalam era reformasi. Hal yang lebih nampak adalah pada sistem pengkaderan dalam partai politik. Banyak partai politik dimana pemimpin dan pengurusnya merupakan orang-orang yang memiliki pertalian persaudaraan dan kepentingan. Nepotisme ini juga terjadi di dunia usaha, bahkan profesi.

Akibat kondisi seperti ini, sistem sosial menjadi rapuh. Logikanya, mekanisme organisasi, sistem, birokrasi, prosedur seringkali bisa dilampaui oleh orang-orang yang terlibat dalam kepentingan. Sistem tidak lagi obyektif, prosedur tidak selalu mekanis, birokrasi bisa dipotong, oleh orang yang memiliki kepentingan dan pertautan dengan pemangku jabatan.

Lihatlah fakta di lapangan, banyak orang memiliki kemampuan tidak selalu mendapat kepercayaan regenerasional dalam organisasi, termasuk birokrasi pemerintahan. Sistem kenaikan pangkat, seperti daftar urut kepangkatan dalam banyak kasus tidak konsisten. Karier seseorang yang telah dirintis lama, bisa dikalahkan oleh seseorang yang tanpa berkarier lama tetapi punya kekuatan finansial. Orang jahat mampu merebut kepemimpinan, yang penting punya prasyarat finansial. Orang cerdas pandai tidak selalu menjadi penggerak dalam perubahan, karena dikalahkan oleh orang tidak shalih tetapi punya daya pengaruh materi. Agama hanya ramai pada kata-kata dan simbol, tetapi miskin makna. (Andito.1998: 72)

Akibatnya rusaknya sistem sosial seperti ini, generasi terpelajar mengalami kegalauan. Usaha yang panjang, pengetahuan yang luas, ilmu yang dalam merupakan wilayah normatif untuk mencapai cita-cita. Di alam realitas, terpenuhinya syarat tersebut tidak selalu mengantarkan pada cita-cita yang digantung. Kondisi ini terjadi pada hampir semua ranah, mulai ranah hukum,

politik, eksekutif, bisnis, profesi dan sebagainya. Kegagalan anak-anak terpelajar ini berakibat pada mudarnya sistem kepercayaan terhadap tataran normatif, mekanisme dan sistem. Efek buruknya anak-anak terpelajar tidak terbangun jiwa obyektif, membentuk pribadi tangguh yang siap berkompetisi, tidak mau berlelah-lelah untuk masa depan. Inilah sisi lain rusaknya sistem sosial yang menyebabkan hancurnya tradisi membangun karakter anak didik.

3. Politik Pendidikan Belum Mapan

Ada semacam pemero dalam tradisi pemerintahan di Indonesia, yakni berganti pemerintahan berganti pula kebijakan, atau sentimentilnya ganti menteri ganti kebijakan. Pergantian kebijakan dalam dunia pendidikan dapat dilihat dalam kebijakan kurikuler yang dibangun. Pada jaman Orde Baru, Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djoyonegoro mengembangkan konsep *Link and Match*, yakni lembaga pendidikan harus mengembangkan pembelajarannya dengan berorientasi pada lapangan kerja. Dasar berfikirnya banyak sekali lulusan yang tidak dapat terserap di dunia kerja bukan karena mutu lulusan tersebut rendah, tetapi karena kecakapan yang dimiliki tidak sesuai dengan kesempatan kerja di masyarakat.

Pada era reformasi muncul kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini dilatarbelakangi gagalnya kurikulum berbasis materi. Kurikulum berbasis materi dianggap tidak tepat lagi digunakan, karena belajar lebih banyak berorientasi untuk menguasai materi sebanyak-banyaknya, berorientasi pada materi bukan pada tumbuh kembang siswa. Pendidikan dianggap sebagai media konservasi nilai, ilmu dan pengetahuan. (Mulyana. 2004:116). Konsep pendidikan ini dikritik tidak mampu menghasilkan produk baru, menemukan dan menyelesaikan masalah baru dan sebagainya. Dari sini lalu muncullah kurikulum berbasis kompetensi yang menakankan pendidikan bukan pada penguasaan materi belajar, tetapi kemampuan untuk melakukan sesuatu berdasar pengetahuan yang dimiliki. Tujuan pendidikan bukan menguasai materi, tetapi mampu melakukan sesuatu.

Selanjutnya, pada masa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, kurikulum berbasis kompetensi (KBK) direvisi dengan munculnya kebijakan kurikuler, yakni lahirnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini dianggap penyempurnaan dari KBK. Perbedaannya, KBK menekankan pada produktifitas yang distandarisasi, sedang pada KTSP adalah produktifitas atau kompetensi kreatif. Setiap sekolah memiliki kewenangan untuk

mengembangkan kurikulumnya sendiri berdasar kepentingan, sumber daya dan orientasi sekolah dan masyarakat.

Kurikulum ini tentu memiliki keunggulan dibanding kurikulum sebelumnya, namun juga perlu disadari bahwa keunggulan yang dianggap pada masa ini belum tentu di masa yang akan datang menjadi pilihan, dan sangat mungkin dievaluasi untuk disempurnakan atau bahkan dihilangkan. Inilah yang menjadi masalah dalam pembangunan sistem pendidikan Indonesia.

Beberapa waktu lalu, ketika angka kenakalan remaja dan anak sekolah menonjol ada pemikiran untuk membangun kurikulum pendidikan budi pekerti. Lalu pada saat ekonomi krisis dan orang sadar bahwa generasi negeri Indonesia lebih banyak berorientasi menjadi karyawan atau pekerja, lalu muncul pemikiran mendesain kurikulum wirausaha di sekolah.

Pergantian ini menandakan bahwa kebijakan politik pendidikan Indonesia belum mapan. Karena itu agar memiliki desain politik pendidikan yang mapan, tidak mudah koyak, perlu kajian strategis untuk menemukan masalah yang mendasar, sehingga dapat dirumuskan kebijakan strategis politik pendidikan yang mapan juga. Di sinilah perlu langkah evaluasi kurikulum yang didasarkan atas kajian yang sistematis – komprehensif, bukan didasarkan atas argumentasi dan pendapat (Sukmadinata, 1997: 60).

4. Kurang Teladan

Faktor ke empat yang menyebabkan buruknya bangunan karakter anak didik adalah sedikitnya teladan kebaikan. Kondisi sosial saat ini berbeda dengan sepuluh atau bahkan dua puluh tahun yang lalu. Pada saat itu banyak figur yang pantas menjadi teladan dan inspiratif bagi anak didik. Figur yang diidolakan anak ada mulai dari lingkungan kesehariannya sampai dengan tokoh nasional yang hanya mereka bisa lihat di televisi, koran atau dengar melalui radio. Sekarang ini kondisinya telah berubah, dimana sulit didapatkan tokoh yang difigurkan oleh publik.

Di lingkungan setempat anak didik berada belum tentu orang-orang dekat menjadi pribadi yang inspiratif bagi tumbuh kembang psikologis anak didik. Tidak setiap guru adalah teladan yang baik, juga tidak setiap orang tua maupun keluarga yang membesarkan dan mengasuh menjadi teladan bagi anak. Kebanyakan keluarga lebih fokus berperan sebagai orang yang bertanggung jawab, tetapi belum menjadi figur teladan. Guru dan orang tua juga lebih

banyak berorientasi pada capaian materi akademis, kurang menguatkan orientasi moral (Robert Coles.2003: 2009). Ada banyak kasus yang terjadi dan di ekspose secara nasional tentang ketidakpatutan guru, baik dalam konteks sebagai ilmuwan maupun tokoh moral. Dalam konteks etika keilmuan tidak sedikit guru yang terlibat dalam manipulasi nilai atau jual beli nilai, terlibat dalam jual beli kunci jawaban ujian, sampai pada jual beli ijasah. Dalam konteks etika individu, kasus-kasus moralitas yang dilakukan oleh oknum guru cukup banyak.

Anak didik juga mengalami kesulitan mendapatkan tokoh atau figur nasional di saat-saat sekarang ini. Dahulu presiden menjadi simbol capaian cita-cita besar anak. Ini dapat dilihat dari jawaban anak atas pertanyaan apa cita-citanya esok hari. Namun sekarang perlakuan publik terhadap presiden tidak seperti dahulu lagi. Presiden bisa dikritik, bahkan dalam aksi atau demonstrasi bisa dicaci maki, gambarnya bisa dijadikan topeng dengan grafis lawakan, bahkan diinjak-injak dan dibakar. Profesi dokter juga menjadi cita-cita banyak anak, namun di ranah hukum, etika dan profesi sering ditampilkan banyaknya kriminalitas, moralitas dan *abuse of power* yang dilakukan oleh dokter. Banyak sekali kasus moral, bahkan kriminal yang dilakukan oleh orang cerdas pandai. Inilah fakta dari teori bahwa kecerdasan otak tanpa disertai kebijakan moral akan memunculkan masalah (Muhajir.2000: 104).

Lalu apa yang terjadi dengan realitas sosial seperti di atas? Kebanyakan anak didik mengalami krisis figur yang diidolakan. Mereka lalu menemukan kesimpulan bahwa relativitas figur sangat mungkin, dan mereka mencari figur untuk mereka sendiri, menemukannya dan dianggap figur yang sama tepatnya bagi efek dirinya. Inilah problem yang menyebabkan menipisnya bangunan karakter anak didik saat ini.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap masalah melemahnya karakter di kalangan pelajar kita ini ? Meminta pertanggungjawaban terhadap globalisasi tentulah tidak bisa, karena dia menjadi tata nilai yang sekalipun bangsa kita menolaknya, secara sosiologis akan menggelinding juga. Mengkambinghitamkan teknologi juga tidak bisa, karena sebagai produk *science* IT bebas nilai. Menyalahkan dinamika sosial yang terjadi juga tidak menyelesaikan masalah, dan cenderung hanya menemukan sebab musababnya saja.

Masalah ini perlu dikembalikan pada teori lama, bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah dan masyarakat (Abu Su'ud, 2010: 2). Teori lama ini bukan tidak menarik lagi sepanjang aktualisasinya maksimal dan benar-benar *mutual triangle*, segitiga yang sama-sama seriusnya. Kritik terhadap praktek teori tersebut selama ini adalah secara politis sudah ada statemen para pihak yakni pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan bahwa masalah pendidikan menjadi tanggungjawab bersama. Tetapi pada tingkat *action* belum menemukan bentuk yang tepat sesuai diagnosa masalah yang dihadapi dan otoritas yang dimiliki.

Mari kita coba simulasi sederhana. Jika ada masalah budaya berkendara di kalangan pelajar, misalnya kebut-kebutan atau tidak disiplin, maka tiga otoritas harus menjalankan fungsinya masing-masing secara maksimal. Masyarakat (orangtua) harus membatasi penggunaan sepeda motor pada anaknya, ekstrimnya tidak memfasilitasi kendaraan pada anak di bawah usia 17 tahun. Selanjutnya sekolah memiliki kewenangan untuk tidak menyediakan ruang parkir kendaraan siswa, karena secara legal siswa belum boleh berkendara di jalan umum. Pemerintah (kepolisian) juga memberlakukan sanksi tegas pada siswa berkendara tanpa surat ijin mengemudi atau pelanggaran lain.

Apa yang terjadi selama ini? guru terus menasehatkan sopan santun berkendara, polisi rajin melakukan razia, tapi orang tua tetap saja memfasilitasi kendaraan untuk anak-anaknya. Alasan ekonomis, praktis, sosiologis bisa saja dikatakan orang tua, tetapi pada segitiga ini simpul paling penting adalah orang tua.

Ramai-ramai pornografi masuk ke ruang kelas juga hal yang tidak jauh beda. Guru lelah melarang siswa menggunakan *handphone*, merazia gambar atau video tidak mendidik di *handphone* siswanya. Pemerintah juga telah berusaha membatasi situs porno. Tapi jumlah siswa pengguna *handphone* tidak mengecil, makin banyak. Bisa saja siswa membeli dari uang saku yang disisihkan sendiri, tetapi lebih banyak yang dibeli dengan uang orang tuanya, bukan? Di sinilah sebetulnya orang tua punya otoritas paling fundamental dalam mengokohkan kembali norma dan etika di kalangan pelajar, dengan strategi dan pendekatan yang efektif. Namun kebanyakan orang tua gagal melakukannya (Maurice.2003: 208).

Berharap pada pemerintah untuk merazia pelajar yang nongkrong di mall atau area bermain (*play ground – play station*) bisa saja, tetapi apakah akan seterusnya satpol PP atau polisi menghabiskan energinya untuk itu?